

IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN BERDASARKAN

UU RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus pada Keluarga Nelayan di Desa Pecangaan

Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013)

NASKAH PUBLIKASI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai

Derajat Sarjana S-I Program Studi Pendidikan

Pancasila dan Kewarganegaraan



Disusun Oleh :

ELI PUSPITANINGSIH

A220100036

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Ahmad Yani Tromol Pos I-Pabelan , Kartasura Telp. (0271) 717417 Fax: 715448 Surakarta
57102

Surat Persetujuan Artikel Publikasi Ilmiah

Yang bertanda tangan di bawah ini Pembimbing skripsi/tugas akhir:

Nama : Dra. Sundari, M.Hum

NIK : 151

Telah membaca dan mencermati naskah artikel publikasi ilmiah, yang merupakan ringkasan skripsi (tugas akhir) dari mahasiswa:

Nama : ELI PUSPITANINGSIH

Nim : A220100036

Fakultas/progdi : FKIP/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jenis : Skripsi

Judul : IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN
BERDASARKAN UU RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus pada Keluarga Nelayan
di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun
2013)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dapat dipublikasikan.

Demikian persetujuan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Surakarta, 27 Juni 2014

Pembimbing

Dra. Sundari, M.Hum

NIK. 151

**SURAT PERNYATAAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Bismilahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ELI PUSPITANINGSIH

NIM/NIK/NIP : A220100036

Fakultas/Jurusan : FKIP / PKN

Jenis : Skripsi

Judul :

**IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN
BERDASARKAN
UU RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK**

**(Studi Kasus pada Keluarga Nelayan di Desa Pecangaan
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalihkan mediatkan/mengalih formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta mengaihkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 7 Juli 2014
Yang menyatakan



ELI PUSPITANINGSIH

ABSTRAK
IMPLEMENTASI HAK ANAK DALAM PENDIDIKAN BERDASARKAN
UU RI NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi Kasus pada Keluarga Nelayan di Desa Pecangaan
Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013)

Eli Puspitaningsih, A220100036, Program Studi Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014,
xvi + 148 halaman (termasuk lampiran)

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil dan mendeskripsikan implementasi hak anak dalam pendidikan pada keluarga nelayan berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013. Subjek penelitian ini adalah orang tua, anak dan tokoh masyarakat, Objek penelitian ini adalah implementasi hak anak dalam pendidikan berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013). Teknik pengumpulan data yang dilakukan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dengan menerapkan model analisis interaktif kualitatif melalui proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Keabsahan data penelitian ini adalah dengan menggunakan triangulasi sumber data, dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan, mengumpulkan data pedoman wawancara tidak terstruktur, observasi dan telaah dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) profil hak anak dalam pendidikan pada keluarga nelayan menunjukkan kurang adanya respon dari masyarakat terhadap pentingnya pendidikan bagi anak, (2) bentuk implementasi hak anak dalam pendidikan pada keluarga nelayan menunjukkan bahwa sudah ada pelaksanaan yang mengarah dalam hal pendidikan seperti orang tua mengingatkan anak untuk melanjutkan sekolah, adanya vasilitas yang diberikan seperti sekolah, gratis biaya pendidikan, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi hak anak dalam pendidikan pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati adalah kurang begitu maksimal dikarenakan ada anak putus sekolah dengan menyertakan alasan, keinginan membantu pekerjaan orang tua meskipun usia anak belum pantas mencari nafkah, kurangnya keinginan melanjutkan sekolah, kebiasaan hidup dengan hal kurang baik seperti minuman keras, merokok, kluyuran, kurang motivasi dari orang tua dan masyarakat untuk membujuk anak dalam mewujudkan cita-cita agar tetap bersekolah.

Kata kunci: anak, pendidikan, keluarga nelayan.

Surakarta, 12 Juni 2014
Penulis

Eli Puspitaningsih

PENDAHULUAN

Anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara. Adapun status, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun pada kenyataan banyak anak-anak di Indonesia yang terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak karena ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan. Bahkan mereka memiliki masa depan yang tidak jelas. Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang sebagian penduduknya melakukan usaha produksi seperti di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan. Akan tetapi, pembangunan di bidang-bidang tersebut masih belum optimal terutama di bidang perikanan. Belum optimalnya pembangunan di bidang perikanan dapat dilihat dari adanya lingkaran kemiskinan yang menjerat nelayan hingga saat ini. Salah satu penyebab belum optimalnya pembangunan di bidang perikanan karena masih rendah tingkat pendidikan nelayan di Indonesia. Tingkat pendidikan di keluarga nelayan yang masih rendah menyebabkan kehidupan tidak bisa berkembang. Disini orang tua memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak. Persoalan untuk memelihara dan mendidik tidak hanya terbatas sampai anak tersebut menikah dan dapat hidup mandiri.

Keluarga adalah lingkungan yang pertama dan utama dikenal oleh anak. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa sebenarnya keluarga mempunyai fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai penerus keturunan saja. Karena keluarga adalah lingkungan yang utama. Di sinilah peran orang tua ditantang untuk mampu mengembalikan karakter agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebaik-baiknya. Pecangaan adalah salah satu daerah pemukiman nelayan yang terletak di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Daerah ini kebanyakan masyarakatnya memiliki mata pencaharian nelayan. Kebanyakan anak-anak mereka tidak melanjutkan pendidikan dengan berbagai macam alasan.

KAJIAN TEORI

1. Pengertian Hak. Menurut Agustina (2011), hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mengeluarkan pendapat.

2. Pengertian Anak. Menurut Kurniawan (2011:10), anak adalah makhluk seperti juga orang dewasa. Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencari taraf kemanusiaan yang normal.
3. Pengertian Hak Anak. Menurut UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal I ayat (12) menyebutkan bahwa, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
4. Macam-Macam Hak Anak. Menurut UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Bab III Pasal 4-18 yang berisi mengenai hak anak sebagai berikut.

Pasal 4.

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5.

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6.

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7.

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. (2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8.

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi.
- b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
- c. Penelantaran.
- d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan.
- e. Ketidakadilan.
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial.
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
5. Pengertian Pendidikan. Menurut Ihsan (2003:2), pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan.
 6. Faktor Pendidikan. Menurut Ahmadi dan Uhbiyati (2001:140), faktor pendidikan adalah hal yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, atau dapat dikatakan bahwa faktor pendidikan memuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik.
 7. Tujuan Pendidikan. Menurut Suardi (2012:6), tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakan kegiatan pendidikan.
 8. Alat Pendidikan. Menurut Jumali dkk (2012:96), alat pendidikan adalah hal yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan atau situasi yang membantu pencapaian tujuan pendidikan.
 9. Lingkungan Pendidikan. Menurut Jumali dkk (2012:99), lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan meliputi lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
 10. Fungsi Pendidikan. Menurut Hasbullah (2001:9), fungsi pendidikan adalah sebagai berikut:
 Sebagai pelatih, pengembang, pemberi atau pewaris. Kemudian terdapat bahan yang dilatihkan, dikembangkan, diberikan dan diwariskan yaitu pengetahuan, keterampilan, berpikir, karakter yang berupa bahan ajar, serta ada murid yang menerima latihan seperti pengembangan, pemberian dan pewarisan pengetahuan, keterampilan, pikiran dan karakter.

11. Indikator Hak Anak dalam Pendidikan. UU RI Nomor 23 Tahun 2002 dalam pasal 48, 49, 50C dan 53 ayat 1 mengenai perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50

Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri.

Pasal 53

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

12. Pengertian Keluarga. Menurut UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan bahwa:

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah samapai dengan derajat ketiga.

13. Pengertian Nelayan. Menurut Poerwadarminta (1984), nelayan adalah penangkap ikan di laut.

14. Pengertian Keluarga Nelayan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga nelayan adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, yang secara aktif melakukan pekerjaan dalam operasi penangkapan ikan, bintang laut atau bahkan tanaman air lainnya.

15. Implementasi Hak Anak dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Hak anak dalam pendidikan seringkali diabaikan oleh beberapa pihak, baik anak atau bahkan orang tua. Tingkat pendidikan di keluarga nelayan masih rendah, hal ini menyebabkan kehidupan tidak bisa berkembang. Peran orang tua sangat berpengaruh dalam memelihara dan mendidik anak-anak. Masyarakat

nelayan adalah salah satu komunitas masyarakat atau kelompok orang yang hidup di pesisir pantai. Hak anak dalam pendidikan diatur dalam UU RI Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak dalam Pasal 48-54. Hak anak dalam pendidikan merupakan hal yang sangat diperlukan guna menjadikan anak yang lebih baik.

METODE PENELITIAN

1. Tempat penelitian ini adalah di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Tahap-tahap dalam pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dari tahap persiapan samapi dengan penulisan laporan penelitian. Secara keseluruhan semua kegiatan dilakukan selama kurang lebih empat bulan, mulai bulan Maret 2014 sampai dengan Juni 2014.
2. Metode yang digunakan adalah pengamatan, wawancara atau penelaahan dokumentasi. Dipilihnya metode tersebut dalam penelitian ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang implementasi hak anak dalam pendidikan, hal ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan penelitian kualitatif didasarkan pada keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dan subjek penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya.
3. Penelitian ini merupakan studi kasus, karena penelitian ini lebih mengkhususkan pada satu masalah yang di teliti yaitu Implementasi Hak Anak dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 pada Keluarga Nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 2013. Sekaligus pula dalam proses pengumpulan datanya peneliti terjun langsung ke lapangan guna menelaah secara mendalam mengenai kasus tersebut.
4. Penelitian ini menggunakan teknik interaktif yang meliputi wawancara, observasi dan mencatat dokumentasi atau arsip. Dalam penelitian ini instrumen pengumpulan data yang digunakan untuk wawancara, mewawancarai orangtua, anak dan tokoh masyarakat Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Observasi dengan menggunakan instrumen lembar pengamatan untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan mengenai Implementasi hak

anak dalam pendidikan di desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati.

5. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan model analisis interaktif, peneliti berusaha mengkaitkan dengan fokus penelitian ini yaitu hak anak dalam pendidikan berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (studi kasus pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati tahun 2013).

HASIL PENELITIAN

Hak anak dalam pendidikan sering bertentangan terhadap UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terutama pada nelayan yang terbiasa dengan kehidupan keras dan kasar. Anak, seharusnya dibiasakan dengan kehidupan yang baik. Tetapi pada kenyataannya kebanyakan anak nelayan sudah dibiasakan dengan contoh yang kurang baik dari warga sekitar. Contohnya seperti merokok, minum-minuman keras, sering keluar malam dan lain-lain. Sehingga tanpa disadari anak tersebut meniru kebiasaan buruk dengan sendirinya. Walaupun sebagian orang tua sudah mengingatkan anak untuk terbiasa dengan kehidupan yang baik akan tetapi hal itu seringkali diabaikan begitu saja. Anak bukanlah hanya seorang manusia yang berbentuk mini tetapi anak memiliki pikiran, perasaan, sikap dan minat yang berbeda dengan orang dewasa. Tetapi anak membutuhkan peran orang lain untuk mengembangkan kemampuan yang dimiliki, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Dengan adanya pendidikan didalam keluarga, sekolah dan masyarakat atau teman sebaya maka anak akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan. Anak maka akan menjadikan negara lebih maju dan berkembang atau malah terpuruk dan tersingkirkan. Pendidikan anak sangat diperlukan karena dengan mendidik dan memberikan pengajaran terhadap anak maka akan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Implementasi Hak Anak Dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun

2002 Tentang Perlindungan Anak Studi Kasus pada Keluarga Nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013.

1. Profil hak anak dalam pendidikan berdasarkan UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pada keluarga nelayan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013. Pendidikan anak di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan kabupaten Pati kurang begitu mendapatkan respon yang baik, terbukti dengan adanya data yang peneliti peroleh dari Kepala Desa dan sekretaris Desa Pecangaan Kecamatan Batangan kabupaten Pati, yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan anak masih tergolong rendah.
2. Implementasi Hak Anak Dalam Pendidikan Berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pada Keluarga Nelayan Di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati Tahun 2013. Implementasi Hak Anak dalam Pendidikan di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati kurang begitu mendapatkan respon dari anak dan masyarakat sekitar. Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti menunjukkan kurang adanya respon dari masyarakat dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu,Ahmadi dan Nur Uhbiyadi.2001.*Ilmu Pendidikan*.Jakarta: Rineka Cipta
- Agustina,Rinny.2011.*Pengertian Hak dan Kewajiban*.<http://rinny-agustina.blogspot.com/2011/02/pengertian-hak-dan-kewajiban.html>
- Kurniawan, Adi. 2011. “Profil Anak Jalanan di Salatiga (Studi Deskriptif Kualitatif Perspektif Hak-Hak Anak pada Anak Jalanan di Terminal Tingkir Tahun 2010)”. *Skripsi S-I*. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- RI.2013.*Undang-Undang Tentang Hak Asasi Manusia (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*. Jogjakarta:Buku Biru.
- Ihsan, Fuat. 2003. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Suardi, Moh. 2012. *Pengantar Pendidikan Teori dan Aplikasi*. Jakarta:Indeks.
- Jumali, dkk. 2012. *Landasan Pendidikan*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Hasbullah. 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.